TIPOLOGI EKOLOGI BAHASA DI PROVINSI PAPUA BARAT: PERSPEKTIF EKOLINGUISTIK

Hugo Warami
Universitas Papua - Manokwari
warami_hg@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap sistem ekologi bahasa dan daya hidup bahasa di lingkungan administratif pemerintahan Provinsi Papua Barat sebagai bagian penting dari lahirnya Otonomi Khusus Papua. Ekologi bahasa terpolarisasi dalam proses afirmatif atas hak-hak daerah, yakni pengakuan dan penghormatan terhadap bahasa daerah. Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua hadir sebagai salah satu jaminan atas kekhawatiran akan punahnya bahasa daerah yang semakin menguat.

Tipologi ekologi bahasa di Provinsi Papua Barat terstruktur secara sistematis dalam pikiran (kognisi) para penutur bahasa daerahnya dan hanya berfungsi ketika para penutur bahasa itu berinteraksi dalam lingkungannya, yakni lingkungan alam dan lingkungan sosial. Tipologi ekologi bahasa dapat dieskplor melalui perspektif ekolinguistik dengan tujuan dapat mengungkap fakta tipe ekologi, keterkaitan lingkungan kebahasaan, dan ekologi komunitas yang memproduksi kesadaran baru bagi generasi pewarisnya.

Artikel ini memfokuskan pada upaya pengungkapan "Tipologi Ekologi Bahasa di Provinsi Papua Barat: Perspektif Ekolinguistik", dengan memproyeksi masalah yang mencakup: (i) legitimasi tipologi bahasa, dan (ii) tipe ekologi bahasa di Provinsi Papua Barat.

Kata Kunci: *Tipologi, Ekologi Bahasa,* dan *Papua Barat*

Abstract

This article aims to reveal the ecological system of the language and the vitality of the language in the administrative environment of West Papua provincial government as an important part of the birth of the Papua Special Autonomy. Ecology language is polarized in the affirmative on the rights of the region, namely the recognition of and respect for the local language. Act 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua present as one of the guarantees over concerns about the extinction of stronger regional languages.

Typology of ecological language in West Papua province systematically structured in mind (cognition) of the speakers of regional languages and only works when the speakers of languages that interact in the environment, the natural environment and social environment. Typology of language ecology can be explored through ecolinguistic perspective with the aim to reveal the fact type of ecology, environment linkages linguistic, and ecological communities that produce new awareness for the generation of inheritors.

This article focuses on the efforts of disclosure "Typology of Language Ecology in West Papua: Ecolinguistic Perspective", by projecting issues include: (i) the legitimacy of the language typology, and (ii) the type of language ecology in West Papua province.

Keywords: *Typology, Language Ecology, and West Papua*

PENDAHULUAN

Bahasa sebagai sebuah instrumen kontrol pada abad ini merupakan medium untuk mengumpulkan ide-ide berupa pemikiran atau diskursus mental. Taylor (2002: 138) menyebut bahwa bahasa menjadi instrumen untuk memperoleh pengetahuan mengenai dunia sebagai proses objektif dan transparan. Pandangan ini menggambarkan ruang-ruang pengetahuan yang terjadi dalam lingkungan pengalaman pada alam semesta. Sebagai instrumen, bahasa apa pun, baik bahasa-bahasa rumpun atau filum besar atau kecil (berkerabat), termasuk bahasa-bahasa yang baru berkembang karena status politik

bahasanya, memiliki ciri-ciri universal yang arbitrer, dan dapat berafiliasi dalam ruang-ruang ekologi bagi penutur bahasa itu sendiri. Ruang ekologi ini hadir dengan beragam tingkat kesamaan atau kerumitan struktur dan tipologi bahasa yang otonom berdasarkan ciri-ciri kesemestaan. Ekologi bahasa yang memagari dan memproteksi bahasa-bahasa, baik bahasa besar atau kecil dengan status bertahan, berkembang, dan terancam punah memiliki hak untuk "hidup" dan dikaji sebagai objek keilmuan dalam ruang leksikalisasi, gramatikalisasi, dan kulturalisasi.

Ekologi bahasa dalam sejarah perkembangan apa pun, hadir melalui proses keberagaman bahasa dan proses penyusutan bahasa yang walaupun di dukung oleh jumlah penutur bahasa yang banyak atau relatif sedikit, tetap memiliki ruang ekologi tertentu yang telah tersusun secara sistematis dan terus bertahan hidup dalam ruang waktu yang relatif lama. Merujuk pada pandangan Bagus (1999:55) bahwa sebagai bahasa yang hidup, atau pun bahasa yang pernah hidup, setiap bahasa hadir secara fungsional dalam budaya komunitas tertentu. Inilah sesungguhnya otonomi bahasa dalam lingkungan alam dan lingkungan budaya. Fakta menunjukkan bahwa otonomi budaya, termasuk pula transmisi budaya antargenerasi justru secara canggih dinyatakan, dikemas, dan dikomunikasikan, atau diwahanai oleh bahasa.

Ekologi bahasa dalam pandangan Mbete (2012) menghadirkan wujud keberagaman isi lingkungan yang termanifestasi melalui proses interaksi, interelasi, dan interdependensi dalam kurung waktu lama, yang ditandai, diwadahi, dikodekan, dan direpresentasikan secara verbal dalam bahasa-bahasa yang ada di dalam lingkungan tersebut. Selain itu, betapa dalam dan kuatnya "ketergantungan" manusia dan masyarakat tertentu di lingkungan tertentu dengan tanaman-tanaman tertentu sebagai tanaman endemik, misalnya bambu, kelapa, sagu, padi lokal, dan jagung, yang semuanya terekam dalam bahasa-bahasa etnik tertentu itu, menjadi gambaran nyata dan empirik tentang relasi dan interelasi, aksi dan interaksi, tergantung dan saling tergantung dengan tanaman tertentu, atau dengan beberapa tanaman tertentu di lingkungan tertentu (lihat Mbete, 2012: 19 dan Warami, 2013: 2).

Uraian di atas menjadi kilas balik fenomena kebahasaan yang berada di Provinsi Papua Barat sebagai salah satu wilayah ekologi administrasi pemerintahan di tanah Papua. Ekologi bahasa di Provinsi Papua Barat dalam perspektif ekolinguistik memiliki korelasi positif dengan diberlakukannya Otonomi Khusus Papua, di mana penutur bahasa daerah (masyarakat asli) dengan sebaran keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya dalam lingkungan alam sebagai "provinsi konservasi" dapat mendukung tercapainya nilai-nilai kelestarian. Papua Barat merupakan provinsi ke-2 di Tanah Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 1999. Provinsi ini terletak di wilayah ekologi kepala dan leher burung pulau Irian (Papua) pada posisi di bawah garis khatulistiwa antara 129° - 132° Bujur Timur dan 0° - 4° Lintang Selatan dengan luas wilayah 115.363,50 Km^2. Wilayah provinsi ini memiliki batas-batas wilayah, yaitu a) sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, b) sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda Provinsi Maluku, c) sebelah Barat berbatasan dengan Laut Seram Provinsi Maluku, dan d) sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Papua (lihat Warami, dkk, 2006:9).

Mekarnya Provinsi Papua Barat dari Provinsi Papua mengakibatkan bahasa dan budaya pun ikut dalam kaplingan-kaplingan ekologi administrasi politik. Dampak dari mekarnya wilayah, cakupan wilayah sebaran bahasa dibatasi oleh tapal-tapal batas wilayah administrasi. Penduduk Papua Barat sebagai pemilik bahasa daerah pun tercerabut

dan terkotak-kotak dalam kaplingan-kaplingan ekologi administrasi pemerintahan dan mengabaikan batas-batas bahasa dan budaya yang secara alamiah telah terbangun serta terbingkai sejak lama. Dari uraian di atas, maka yang menjadi titik incar tulisan ini adalah **"Tipologi Ekologi Bahasa di Provinsi Papua Barat: Perspektif Ekolinguistik".** Tulisan ini akan memproyeksikan masalah pada: (i) legitimasi tipologi bahasa, dan (ii) tipe ekologi bahasa di Provinsi Papua Barat.

KONSEP DAN PIJAKAN TEORETIS

Konsep Ekolinguistik

Sejalan dengan perkembangan dan pengembangan ilmu lintas disiplin (interdisipliner), kini dijumpai beberapa istilah yang kesemuannya dipakai untuk menyebut ekolinguistik, yakni (1) ekologi bahasa, (2) bahasa ekologi, (3) ekolinguistik, (4) *linguistic ecology*, (5) ekolinguistik kritis, (6) *ecology of language*, (7) bahasa lingkungan, dan (8) lingkungan bahasa. Selain itu, beberapa ahli bahasa seperti Haugen (1972), Fill & Mushlhausler (2001), Wahab (2003), dan Mbete (2009 dan 2011) juga telah mengemukakan konsep atau definisi yang kesemuanya juga saling mengisi dan saling menunjang. Untuk itu dalam kajian ini, konsep ekolinguistik dapat dikonstruksikan menjadi: (1) interaksi antara bahasa dengan lingkungan (alam, dunia, dan sosial budaya) dan menjadikan bahasa sebagai penanda identitas lingkungannya, (2) ekologi turut serta dan saling mempengaruhi antarbahasa melalui kognisi otak, hati (sikap positif, negatif, tingkat kesetiaan, dan politik) secara nyata dalam wujud pola interaksi verbal (tuturan dan tulisan) dalam komunikasi antarpenutur, (3) ekologi bahasa lebih fokus pada aspek-aspek kebahasaan secara internal dan sebagaian kajiannya itu bersifat bebas nilai, dan (4) sebagai salah satu aspek perilaku manusia (perilaku bahasa) dalam peristiwa kontak dengan lingkungannya (lihat Warami, 2013: 5-6).

Teori Ekolinguistik

Perkembangan ekolinguistik telah menunjukkan beberapa signifikasi kemajuan keilmuan. Beberapa prinsip-prinsip dasar ekolinguistik telah diuraikan dan diformulasi oleh Warami (2013: 5-7) sebagai berikut.

Pertama, komponen utama yang dapat dijadikan sebagai mekanisme kerja ekolinguistik menurut Haugen (1972) terdiri dari tiga komponen, yakni (1) *ideologi*: bahasa hanya ada dalam pikiran para penuturnya, dan akan berfungsi jika para penuturnya berhubungan satu sama lain secara alami sebagaimana dalam lingkungan sosial dan alamiah mereka, (2) *psikologis*: hubungannya dengan bahasa lain dalam pikiran penutur bilingual atau multilingual, dan (3) *sosiologis*: hubungan dengan masyarakat dalam hubungannya sebagai media komunikasi. Mekanisme kerja dapat digambarkan dalam bagan berikut.

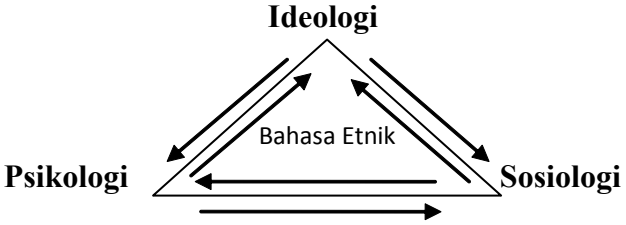

Gambar 1. Trilogi Haugen (1972)

Kedua, parameter yang dapat dipakai dalam ekolinguistik menurut Haugen (1972) yang dikemukakan oleh Fill dan Mushlhausler (2001: 1) dan Mbete (2011) terdiri dari tiga parameter, yakni (1) *interrelationships* (interelasi bahasa dan lingkungan), (2) *environment* (lingkungan ragawi dan sosial budaya), dan (3) *diversity* (keberagaman bahasa dan lingkungan). Parameter tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut.

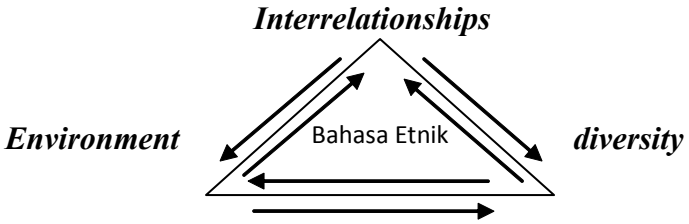

Gambar 2. Parameter Segitiga Haugen (1972)

Parameter Kondisi "Kesehatan" Bahasa

Kondisi bahasa-bahasa yang jumlah penuturnya sedikit dapat dikaitkan secara operasional dengan lima tahapan klasifikasi kondisi "kesehatan" bahasa, sebagai berikut. *Pertama*, bahasa-bahasa yang dianggap *berpotensi terancam punah* adalah bahasa yang secara sosial ekonomi tergolong minoritas serta mendapatkan tekanan yang cukup besar dari bahasa mayoritas. Generasi mudanya (anak-anak) sudah mulai berpindah ke bahasa mayoritas dan jarang menggunakan bahasa ibu (*potentially endangered languages*). *Kedua*, bahasa-bahasa yang dianggap terancam punah adalah bahasa yang tidak mempunyai lagi generasi muda yang dapat berbahasa ibu. Penutur yang fasih hanyalah kelompok generasi menengah atau dewasa (*endangered languages*). *Ketiga*, bahasa-bahasa yang dianggap sangat terancam punah adalah bahasa yang hanya berpenutur generasi tua berusia di atas 50 tahun (*seriously endangered languages*). *Keempat*, bahasa-bahasa yang dianggap sekarat adalah bahasa yang dituturkan oleh beberapa orang yang sepuh yaitu sekitar 70 tahun ke atas (*moribun languages*). *Kelima*, bahasa-bahasa yang dianggap punah adalah bahasa yang penuturnya tinggal 1 orang sehingga tidak ada teman berkomunikasi dalam bahasa itu apalagi jika sudah tidak ada penuturnya lagi (*extinct languages*) (lihat Wurm, 1988, Crystal, 2000 dan Lauder, 1999:155-156).

PEMBAHASAN

Legitimasi Tipologi Bahasa

Legitimasi tipologi bahasa dalam perspektif ekolinguistik menurut Sapir dalam Fill dan Muhlhausler (2001:14) dan Mbete (2011) terdiri dari dua paradigma, yakni (1) lingkungan ragawi dan (2) lingkungan sosial (lihat Warami, 2013:5-6). Paradigma tipologi bahasa dalam perspektif ekolinguistik dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Paradigma Ekolinguistik

LINGKUNGAN BAHASA	
RAGAWI	**SOSIAL**
Topografi	Power Sosial
Iklim	Agama
Curah Hujan	Etika
Flora	Organisasi Sosial
Fauna	Organisasi Politik
Sumber Mineral	Seni

Diolah oleh: Hugo Warami, 2013

Mengacu pada paradigma ekolinguistik dalam tabel di atas, maka dapat diduga bahwa penyebaran bahasa berdasarkan tipologi lingkungan bahasa di Provinsi Papua Barat terlegitimasi ke dalam dua lingkungan, yakni (1) lingkungan ragawi dan (2) lingkungan sosial.

Lingkungan Ragawi

Lingkungan ragawi dalam paradigma ekolinguistik merupakan fenomena ekologi yang mencirikan aspek-aspek ragawi seperti: topografi, iklim, curah hujan, flora, fauna, sumber mineral, dan lain sebagainya yang secara alamiah tersimbol dan terepresentasi dalam ekologi alam pula. Berdasarkan lingkungan ragawi, penutur bahasa daerah di Provinsi Papua Barat merupakan orang-orang asli Papua rumpun ras Melanesia yang hidup berdampingan di antara ekologi ragawi gugusan-gugusan pulau dengan berpenghuni orang-orang hitam dan menyebar seiring dengan perkembangan budaya, sejarah, adat istiadat, dan bahasa. Ekologi penutur bahasa daerah ini terbentang di antara gunung-gunung yang tinggi, lembah-lembah yang dalam, dan dataran-dataran rendah yang luas, semuanya tertutup hutan rimba dan dilintasi sungai-sungai yang besar serta rawa-rawa yang tak berujung dan kepulauan. Berdasarkan keadaan alamnya, maka ada sebagian penutur bahasa daerah di Papua hidup dari sagu dan ikan, ada lagi yang hidup dari berkebun ubi (talas) atau pisang, dan lain sebagainya. Kondisi ekologi lingkungan ragawi Provinsi Papua Barat sangat bervariasi membentang mulai dari dataran rendah, rawa sampai dataran tinggi, dengan tipe tutupan lahan berupa hutan hujan tropis, padang rumput dan padang alang-alang. Ketinggian ekologi wilayah di Provinsi Papua Barat bervariasi dari 0->1000 m. Pembagian wilayah Provinsi Papua Barat berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut dapat digolongkan ke dalam empat kelompok yaitu: (1) wilayah dengan ketinggian 0-100 meter dpl; (2) wilayah dengan ketinggian >100-500 meter dpl; (3) wilayah dengan ketinggian >500-1000 meter dpl; dan wilayah dengan ketinggian >1000 meter dpl.

Tipologi ekologi bahasa lingkungan ragawi bagi bahasa-bahasa di Provinsi Papua Barat, baik yang tergolong dalam rumpun Austronesia (Melayu-Polinesia) dan Non-Austronesia diperkirakan menyebar sekitar 3500-4000 tahun yang lalu, termasuk kondisi bahasa saat ini yang berkisar 150 ragam bahasa Melayu-Polinesia yang digunakan di Papua New Guinea (bdk. Muler, 2008: 62). Tipologi ekologi bahasa lingkungan ragawi menunjukkan bahwa sebagian bahasa di Provinsi Papua Barat menyebar dan mendiami ekologi lepas pantai atau di sepanjang pesisir pantai utara pulau Papua. Kemiripan struktur dan kosakata dalam dialek bahasa-bahasa di Provinsi Papua Barat, menjadi salah satu ciri penggolongan ke dalam dalam satu rumpun bahasa atau lingkungan bahasa yang sama.

Berdasarkan tipologi ekologi bahasa lingkungan ragawi, maka bahasa-bahasa di Provinsi Papua Barat dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok bahasa, yakni (1) kelompok *filum Austronesia* ada terdapat 25 bahasa (Matbat, Biga, Maya, Maden, Biak, Kawe, Wauyai, Legenyem, Waigeo, Yeretuar, Tandia, Roon, Dusner, Meoswar, Kuri, Irarutu, Wandamen, As, Bedoanas, Erokwanas, Kowini, Onim, Arguni, Sekar, dan Duriankere); (2) kelompok *filum Papua Barat* ada terdapat 12 Bahasa (Seget, Moi, Moraid, Abun, Karon Dori, Mpur, Kalabra, Tehit, Maibrat, Kais, Kaburi, dan Hattam); (3) Kelompok *filum Kepala Burung Papua* ada 3 Bahasa (Meyah, Moskona/Moile, dan Manikion/Sough); dan (4) Kelompok *Filum Trans Papua Barat* ada terdapat 15 bahasa (Arandai, Konda, Yahadian, Suabo, Puragi, Kokoda, Kemberano, Tanah Merah/Simuri, Iha, Baham, Karas, Uruangniria, Mairasi, Buruwai, dan Kamberau). Keempat kelompok

bahasa di atas dikategorikan ke dalam dua rumpun besar, yakni Austronesia (25 bahasa) dan Non-Austronesia (30 bahasa) dengan total jumlah bahasa yang tersebar wilayah ekologi Papua Barat sebanyak 55 bahasa (lihat Warami, 2009).

Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial dalam paradigma ekolinguistik merupakan fenomena ekologi yang mencirikan aspek-aspek sosial seperti power sosial, agama, etika, organisasi sosial, organisasi politik, dan lain sebagainya yang secara sosial budaya tersimbol dan terepresentasi dalam ekologi sosial pula. Berdasarkan lingkungan sosial, penutur bahasa di Provinsi Papua Barat merupakan kelompok penutur yang multibahasa. Ekologi penutur bahasa, baik bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing berdasarkan data yang tersedia pada BPS Provinsi Papua Barat tahun 2012 sebanyak 760.422 jiwa. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk Provinsi Papua yang mencapai 1.900 000 jiwa pada tahun 2010. Sebaran jumlah penutur bahasa berdasarkan lingkungan sosial di Provinsi Papua Barat, yakni (1) Kabupaten Fakfak sebanyak 66.828 jiwa, (2) Kaimana sebanyak 46.249 jiwa, (3) Teluk Wondama sebanyak 26.321 jiwa, (4) Teluk Bintuni sebanyak 52.422 jiwa, (5) Manokwari sebanyak 187.726 jiwa, (6) Sorong Selatan sebanyak 37.900 jiwa, (7) Sorong sebanyak 70.619 jiwa, (8) Raja Ampat sebanyak 42.507 jiwa, (9) Tambrauw sebanyak 6.144 jiwa, (10) Maybrat sebanyak 33.081 jiwa, dan (11) Kota Sorong sebanyak 190.625 jiwa. Pertumbuhan jumlah penutur bahasa berdasarkan ekologi lingkungan sosial di Provinsi Papua Barat tergolong tinggi, hingga mencapai rata-rata 10, 83 % per 3 tahun atau 3,60 % pertahun. Tingkat pertumbuhan ini tergolong sangat tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan nasional yakni 1,3 % pertahun. Di kabupaten-kabupaten induk, tingkat pertumbuhan mencapai rata-rata 3,21% pertahun. Sebaliknya di kabupaten-kabupaten pemekaran, tingkat pertumbuhan jauh lebih tinggi hingga mencapai 7,21 % per tahun.

Selain itu, sejak Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua diberlakukan, membawa efek yang cukup signifikan bagi keberlangsungan bahasa baik bahasa Indonesia, bahasa Asing, dan bahasa Daerah dalam ekologi lingkungan sosial. Hal ini sebagai konsekuensi logis atas pengakuan hak-hak daerah termasuk pengakuan dan penghormatan terhadap budaya (bahasa) lokal. Misalnya, dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, Bab XVI tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 58 ayat (1) berbunyi Pemerintah provinsi berkewajiban membina dan mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua; (2) selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jenjang pendidikan, (3) bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan dasar sesuai kebutuhan (bdk.Warami, 2009, 2014:306).

Berdasarkan lingkungan sosial, situasi ekologi bahasa di Provinsi Papua Barat terdiri atas tiga ranah pakai lingkungan sosial yang digunakan oleh satu atau lebih suku bangsa yang sama atau berbeda untuk fungsi dan keperluan sosial sehari-hari. Tiga ranah ekologi lingkungan sosial itu terdiri atas: (1) lingkungan bahasa daerah, (2) lingkungan bahasa Indonesia, dan (3) lingkungan bahasa Melayu Papua (BMP). Dari ketiga lingkungan kebahasaan di atas, bahasa Melayu Papua menjadi *lingua franca* 'bahasa lintas suku' bagi ratusan suku atau sub suku di Tanah Papua. Provinsi Papua Barat sebagai kawasan ekologi multibahasa, memiliki lingkungan pengguna bahasa Indonesia yang dipakai dalam dunia

pendidikan dan pemerintah, bahasa Melayu Papua sebagai sarana komunikasi lintas suku bangsa, serta bahasa daerah yang digunakan sebagai sarana komunikasi pada tingkat kampung, ranah keluarga, ranah adat atau budaya. Konstruksi triglosik untuk Tanah Papua dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar prisma berikut.

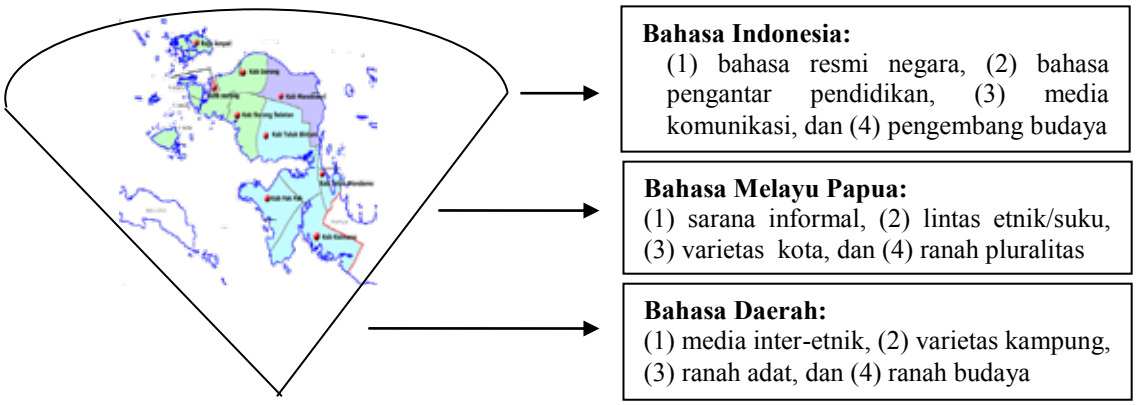

Gambar 3. Tingkatan Ekologi Pengguna Bahasa

Merujuk pada tingkatan ekologi pengguna bahasa di Provinsi Papua Barat di atas, tampak sekali bahwa lingkungan sosial pengguna bahasa Melayu Papua sebagai *lingua franca* atau lintasan sosial pada berbagai tindak komunikasi suku atau subsuku bangsa menjadi area ekologi pengguna bahasa yang multilingual. Warami (2009) menyebut bahwa hampir di setiap lingkungan sosial pengguna bahasa daerah besar dan kecil di Provinsi Papua Barat, hidup dan berkembang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa negara dan bahasa resmi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa bahasa-bahasa daerah hidup berdampingan dengan bahasa Indonesia. Kendatipun berdampingan, jelaslah bahwa bahasa Indonesia lebih dominan, memiliki loyalitas yang tinggi dan besar pengaruhnya atas bahasa daerah. Keloyalitas bahasa Indonesia dalam lingkungan sosial tertentu kadang-kadang menjadi sebuah hal yang mutlak dan wajar dalam bingkai negara kesatuan. Keseragaman memang merupakan sesuatu yang penting dalam membangun kesatuan bangsa Indonesia, tetapi adalah kekeliruan besar bila menganggap bahwa bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat yang efektif untuk membangun bangsa atas keberagaman etnik, secara ekologi telah menggusar bahasa daerah, khusunya pada ranah-ranah tertentu, bahkan tidaklah kecil peluang kemungkinannya bahwa pada suatu ketika.

Berdasarkan tipologi ekologi dengan karakteristik lingkungan sosial bahasa di atas, sebagian bahasa-bahasa di Provinsi Papua Barat masuk dalam kategori sebagai *viable but small* 'bahasa yang mempunyai penutur sekurang-kurangnya 1000 orang'. Untuk itu, bahasa-bahasa yang jumlah penuturnya hanya tinggal 500 orang atau kurang dapat dikategorikan sebagai bahasa yang dianggap memasuki ambang proses berpotensi terancam punah. Mengacu pada data SIL (2006) bahwa bahasa di Provinsi Papua Barat yang jumlah penuturnya berjumlah 500 orang atau kurang ada sebanyak 20 bahasa daerah, yaitu Filum Austronesia: (1) Bahasa Onim (500), (2) Arguni (450), (3) Duriankere (30), (4) Biga (300), (5) Wauyai (300), (6) Legenyem (250), (7) Waigeo (300), (8) Yeretuar (350), (9) Tandia (2), (10) Dusner (20), (11) Meoswar (250), (12) Kuri/Nabi (500), (13) As (230), (14) Bedoanas (180), dan (15) Erokwanas (200); dan Filum Trans Papua Barat: (16) Konda (500), (17) Tanah Merah/Simuri (500), (18) Yahadian (500), (19) Karas (100), dan (20) Uruangnirin (250) (bdk. Crystal, 2002; Lauder, 1999: 157, dan Warami, 2009:)

Tipe Ekologi Bahasa

Ekologi bahasa merupakan salah satu elemen penting yang memberikan tautan antara bahasa tertentu dengan penuturnya dalam lingkungan dan serta menyimpan fenomena-fenomena kebahasaan yang unik dan khas pula. Haugen (2001), Sapir (2001), Muhlhausler (2002), Tondo (2008), dan Mbete (2010 dan 2013) masing-masing mengungkapkan ekologi bahasa sebagai sebuah perspektif yang menjembatani bahasa dalam relasinya dengan lingkungan (fisik, sosial, dan budaya). Paradigma ekologi mengandung kesadaran sekat-sekat lingkungan sumber daya alam maupun sumber daya manusia sebagai penutur bahasa dalam mendukung vitalitas ekologi tersebut (lihat Muhlhausler, 2002: 374). Berdasarkan paradigma ekologi di atas, maka Muhlhausler (2002: 383) menyebutkan delapan parameter yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan ekologi bahasa, yakni (1) status dan kerukunan, (2) persamaan dan perbedaan bahasa dalam kontak yang terjadi, (3) jumlah bahasa yang bersaing, (4) faktor budaya, agama, dan ekonomi, (5) frekuensi perkawinan silang/campur, (6) distribusi fungsional, (7) tingkat kodifikasi, dan (8) intervensi eksternal.

Merujuk pada parameter ekologi bahasa di atas, hampir sebagian besar parameter-parameter tersebut dapat dijumpai pada bahasa-bahasa di dunia. Muhlhausler (2002) menyebutkan bahwa ada enam tipe ekologi bahasa di dunia, yakni (1) tipe ekologi bahasa seimbang (*balanced aquitable ecologies*), (2) tipe ekologi bahasa endemis/eksotis campuran (*mixed endemic/exotic ecologies*), (3) tipe ekologi bahasa kompetitif (*competitive ecologies*), (4) tipe ekologi bahasa kontiniutas dan jaringan bahasa (*networking language and continiutas ecologies*), (5) tipe ekologi bahasa artifisial/buatan (*artificial ecologies*), dan (6) tipe ekologi monolingual yang terisolasi (*isolated monolingual communities*).

Berdasarkan parameter ekologi bahasa dan tipe ekologi bahasa di atas, maka tipe ekologi bahasa di Provinsi Papua Barat terdiri atas dua tipe, yakni (1) tipe ekologi bahasa seimbang (*balanced aquitable ecologies*), dan (2) tipe ekologi bahasa kompetitif (*competitive ecologies*). Kedua tipe ekologi bahasa dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, tipe ekologi bahasa seimbang (*balanced aquitable ecologies*) pada ekologi bahasa di Provinsi Papua Barat merujuk pada situasi kebahasaan komunikasi antarpenutur bahasa-bahasa kecil yang banyak dijumpai berdasarkan amatan multikulturalisme, yakni bahasa-bahasa lokal atau etnik dapat tumbuh-kembang dan memiliki vitalitas hidup yang cukup tinggi. Tipe ekologi bahasa ini mendorong daya hidup yang seimbang antara rumpun bahasa Austronesia (AN) sebanyak 25 bahasa daerah dan Non-Austronesia (NAN) sebanyak 30 bahasa daerah dengan jumlah total bahasa sebanyak 55 bahasa di Provinsi Papua Barat dalam ekologi bahasa yang dinamis dan mendorong terciptanya ekologi budaya yang dinamis pula. Tipe ekologi bahasa seimbang mendorong terciptanya penyadaran tentang khazanah bahasa dan budaya penutur tertentu dalam ekologi budaya tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber daya energi pembangunan. *Kedua*, tipe ekologi bahasa kompetitif (*competitive ecologies*) pada ekologi bahasa di Provinsi Papua Barat merujuk pada situasi kebahasaan dalam tiga ranah ekologi (1) lingkungan bahasa daerah, (2) lingkungan bahasa Indonesia, dan (3) lingkungan bahasa Melayu Papua (BMP). Tipe ini menggambarkan bahwa terjadi kompetitif atas bahasa untuk dapat bertahan, bergeser, atau punah (mati). Dari ketiga kompetitif bahasa di atas, bahasa Melayu Papua hadir menjadi *lingua franca* 'bahasa lintas suku' bagi kedua bahasa lainnya, yakni bahasa Indonesia dan bahasa daerah (etnik). Kompetitif atas bahasa dapat dilihat dari segi ekologi tingkat keterpakaian bahasa, maka pengguna bahasa daerah di Provinsi Papua Barat berkisar antara 15-20 jam sehari. Lingkungan pengguna bahasa Indonesia untuk

tujuan pendidikan dan komunikasi pada level pemerintah lokal berkisar antara 10-12 jam sehari, sedangkan lingkungan pengguna bahasa Melayu Papua di Provinsi Papua Barat menjadi lebih dominan dan relatif cukup tinggi.

SIMPULAN

Merujuk pada uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tipologi Ekologi Bahasa di Provinsi Papua Barat sebagai berikut. *Pertama*, legitimasi tipologi bahasa dalam perspektif ekolinguistik mengacu pada dua paradigma Sapir (2001), yakni (1) lingkungan ragawi dan (2) lingkungan sosial. Lingkungan ragawi penutur bahasa daerah di Provinsi Papua Barat merupakan orang-orang asli Papua rumpun ras Melanesia yang hidup berdampingan di antara ekologi ragawi gugusan-gugusan pulau dengan berpenghuni orang-orang hitam dan menyebar seiring dengan perkembangan budaya, sejarah, adat istiadat, dan bahasa, sedangkan karakteristik lingkungan sosial bahasa di Provinsi Papua Barat masuk dalam kategori sebagai *viable but small* 'bahasa yang mempunyai penutur sekurang-kurangnya 1000 orang' atau jumlah penuturnya tinggal 500 orang atau kurang dikategorikan sebagai bahasa yang dianggap memasuki ambang proses berpotensi terancam punah. *Kedua*, tipe ekologi bahasa di Provinsi Papua Barat terdiri atas dua tipe, yakni (1) tipe ekologi bahasa seimbang (*balanced aquitable ecologies*), dan (2) tipe ekologi bahasa kompetitif (*competitive ecologies*).

DAFTAR PUSTAKA

Bagus, I Gusti Ngurah. 1999. "Bahasa Daerah dan Ilmu Pengetahuan" dalam Prosiding *Bahasa Nusantara: Suatu Awal Pemetaan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia, Ajip Rosidi (Ed.) 1999*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jakarta.

Fill, Alwin and Peter Muhlhausler, 2001 (Ed.). *The Ecolinguistics Reader. Language, Ecology, and Environment*. London and New York: Continuum.

Haugen, Einar. 1972. *The Ecology of Language*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Lauder, Multania, RMT. 1999. "Pelacakan Bahasa Minoritas dan Dinamika Multikultural" dalam Jurnal *PUSTAKA*, Vol.V, No. 10, Tahun 2005. Denpasar: Jurusan Ilmu-Ilmu Budaya, Fakultas Sastra UNUD.

Muhlhausler, Peter. 2002. "Ecology of Language". Dalam Roberth B. Kaplan (ed.), The Oxford Handbook of Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Muller, Kal. 2008. *Mengenal Papua*. Timika: PT. Freeport Indonesia.

Mbete, Aron Meko. 2001. "Paradigma Baru Pemertahanan dan Pengembangan Bahasa" Daerah dalam *LINGUISTIKA*, Edisi Keempatbelas, Maret 2001. Denpasar: Program Pascasarjana Magister dan Doktor Linguistik UNUD.

Mbete, Aron Meko. 2009. "Selayang Pandang Tentang Ekolinguistik: Perspektif Kelinguistikan Yang Prospektif". Bahan untuk berbagi Pengalaman Kelinguistikan dalam Matrikulasi Program Magister Linguistik Program Pascasarjana Universitas Udayana. Denpasar: Program Pascasarjana UNUD.

Mbete, Aron Meko. 2011. "Ilmu Bahasa, Lingkungan Bahasa dan Bahasa Lingkungan". Bahan Matrikulasi bagi Karyasiswa Program Magister Linguistik. Denpasar: Program Pascasarjana UNUD.

Mbete, Aron Meko. 2012. *Penuntun Singkat Penulisan Proposal Penelitian Ekolinguistik* Denpasar:

Program Pascasarjana UNUD.

Sapir, Edward. 2001. "Language and Environment". Dalam Alwin Fill and Peter Muhlhausler (Ed.). *The Ecolinguistics Reader. Language, Ecology, and Environment*. London and New York: Continuum.

Taylor, Charles. 2002. Bahasa dan Hakikat Manusia dalam *Tafsir Politik.* Telaah Hermeneutis Wacana Sosial-Politik Kontemporer (Gibbons, 2002 [Ed.]). (Terjemahan). Yogyakarta: Qalam.

Tondo, Fanny Henry. 2008. "Tipologi Ekologi Bahasa Yaben" dalam Katubi (Ed.). *Ekologi Bahasa Yaben: Diferensiasi Intraetnik*. Jakarta: LIPI Press.

Wahab, Abdul. 2003. "Ekologi Bahasa: Kasus Distorsi Perkembangan Bahasa Indonesia Menjelang Abad 21" dalam Dendy Sugondo (Ed.). *Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Pusat Bahasa – Penerbit Progres Jakarta.

Warami, Hugo., dkk. 2006. *Rencana Pengembangan Wilayah dan Investasi di Provinsi Papua Barat*. Manokwari: BP3D Prov. Papua Barat.

Warami, Hugo. 2009. "Bahasa Daerah dalam Ranah Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat: Sebaran, Ancaman, dan Ancangan" dalam Prosiding Seminar Nasional *Bahasa Ibu II*, Program Studi S2 dan S3 Linguistik, Program Pascasarjana Universitas Udayana, 27-28 Februari 2009.

Warami, Hugo. 2013."Khazanah Pengetahuan Lokal Etnik Waropen - Papua" dalam Jurnal Ilmiah *LANGUA* (*Journal Of Linguistic Research*), Vol.02, No.02, Agustus 2013. ISSN:997-23379-1400-8. Medan: Lembaga Kajian Ekolinguistik.

Warami, Hugo. 2014. "Legitimasi Kekuasaan dalam UU Otsus Papua: Kajian Wacana Kritis". Disertasi. Denpasar: Universitas Udayana Bali.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua*, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara No.135.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No.xx